



Research Paper Publication
Jurnal Ilmiah Manajemen
Terminal Informasi Ilmiah

ISSN : 2089-2330

Vol : 10.03.2021
Hal : 118 - 131

PENGARUH EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN OGAN ILIR

Tutik Pebrianti¹
Anton Trianto²

tutikpebrianti@yahoo.co.id
alkaton79@gmail.com

Dosen Tetap Universitas Sjakhyakirti Palembang

Article Info

Keywords :
Program Effectiveness,
Performance, SIMDA

Abstract

This study aims to analyze the effect of the effectiveness of the implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) program on improving employee performance at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Ogan Ilir Regency. The sample used is purposive sampling, namely as many as 14 employees who are in direct contact with the use of SIMDA. The data used is secondary data. Methods of data collection by using a questionnaire. The research was conducted in May 2021 at the BPKAD Ogan Ilir Office. The analysis technique used is Simple Linear Regression Analysis. The results obtained are that the implementation of SIMDA at BPKAD Ogan Ili can be considered to have been running quite effectively. Based on the results of regression estimation and hypothesis testing through t-test, it was found that the effectiveness of SIMDA implementation has a positive and significant effect on improving the performance of BPKAD Ogan Ilir employees.

Tutik Pebrianti¹
Anton Trianto²

tutikpebrianti@yahoo.co.id
alkaton79@gmail.com

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol : 10.03.2021

PENDAHULUAN

Manajemen pelayanan publik adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu (Silaban, 2010:1). Dengan demikian penerapan kebijakan-kebijakan yang efektif merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan agar pengorganisasian sumber-sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan mampu dikoordinasikan dengan baik untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang direncanakan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada era globalisasi seperti sekarang ini, penerapan kebijakan yang berbasis penerapan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai sudah sangat sangat diperlukan. Penerapan Sistem Informasi yang berbasis teknologi dalam manajemen organisasi sudah menjadi kebutuhan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang cepat, tepat efektif dan efisien.

Menurut Prasajo (2016: 6), definisi sistem informasi itu sendiri adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Informasi berasal dari suatu data atau fakta yang harus diolah terlebih dahulu yang memerlukan sistem pengolahan informasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen (SIM). Mc. Leod (2009), mengemukakan bahwa SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

Menurut Jibril (2017), efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Tingkat efektivitas penggunaan suatu sistem informasi juga akan bergantung pada pengguna sistem itu sendiri. Sehingga penerapan teknologi dalam sistem informasi hendaknya mempertimbangkan pemakai sistem agar teknologi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai (Mulyadi dalam Kristiani, 2012).

Pengukuran untuk menilai sejauh mana efektivitas program penerapan sistem informasi perlu dilakukan untuk mengevaluasi hasil yang didapat. Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : (1) Ketepatan sasaran program; (2) Sosialisasi program; (3) Pencapaian Tujuan program; serta (4) Pemantuan program. Sementara itu Siagian (2006) mengemukakan ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif ada beberapa kriteria, yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) Penyusunan program yang tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Penggunaan sistem informasi manajemen dalam kerja pemerintahan merupakan sebuah bentuk kebijakan/program yang diterapkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Definisi kinerja menurut Mangkunegara (2017:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Robbins (2015), mengemukakan bahwa aspek untuk mengukur kinerja pegawai secara individu adalah sebagai berikut: (1) Kualitas kerja; (2) Kuantitas; (3) Ketepatan waktu; (4) Efektivitas; (5) Kemandirian; (6) Komitmen kerja

Pemerintah Indonesia, dalam hal tata kelola keuangan memanfaatkan kemajuan sistem teknologi informasi manajemen agar terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Salah satu bentuk pemanfaatan sistem teknologi informasi manajemen adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam tata kelola keuangan daerah. Perangkat lunak tersebut diberi nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah). Dengan aplikasi SIMDA diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan.

Program aplikasi SIMDA dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah ditingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *client, server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mencakup adanya: (a) perangkat; (b) pengelolaan data keuangan; (c) perawatan (Jurnali dan Supomo dalam Indriasari, 2008).

Menurut Hertanto, Domai, & Amin (2017) SIMDA adalah produk implementasi prinsip *e-Government* yang mulai muncul saat diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yaitu tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang kemudian didukung oleh munculnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan menteri Pada Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Sistem informasi manajemen ini dikembangkan guna memudahkan kegiatan organisasi pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dicapai pada setiap periode (satu tahun). Bagi instansi pemerintahan, selain sebagai informasi, laporan keuangan juga digunakan sebagai pertanggungjawaban dan memberikan gambaran indikator keberhasilan kerja pemerintahan tersebut dalam mencapai tujuannya (Ariska, Masnidi, & Rachman, 2019). Setiap laporan keuangan daerah akan memiliki kualitas yang berbeda, tergantung beberapa faktor yang mempengaruhi. Penerapan SIMDA menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bahan evaluasi kerja instansi pemerintah. Implementasi SIMDA bisa meningkatkan keamanan data, karena hanya pihak yang mempunyai wewenang ataupun otoritas yang bisa melakukan akses informasi dan memungkinkan pengguna mengakses informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat (Diana, Eforis, & Osesoga, 2018). Menurut Djaja dalam Budiman dan Arza (2013) aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar pekerjaan dapat terintegrasi, efisien, cepat, dan akurat. Namun menurut (Devi 2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi Pemda secara maksimal.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa keberadaan SIMDA yang memanfaatkan IT ini diharapkan dapat menunjang kinerja pegawai. Kinerja para pegawai dalam suatu lembaga pemerintahan dapat diukur dari sejauh mana mereka memperoleh informasi dengan cepat hingga pada sejauh mana mereka mengolah informasi tersebut dengan akurat sehingga menjadi suatu informasi baru yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Misrawati Madukala, Nasrul, dan Sri Wiyati Maharani (2018) menyatakan bahwa Sistem informasi manajemen dan kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pegawai, Sistem informasi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai, serta Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia Azzindani, Endar Pituringsih, dan M. Irwan (2019). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SIMDA yang telah dilakukan oleh seluruh OPD di Kabupaten Lombok Tengah memiliki dampak positif kepada responden dalam menghasilkan LKPD yang berkualitas dan akuntabel. Artinya, walaupun pada saat awal penguasaan pengoperasian SIMDA yang belum merata di setiap OPD dan dirasakan sulit oleh para pengguna, namun dengan berjalannya waktu pengguna aplikasi SIMDA dapat merasakan dampak positif yang dapat memudahkan mereka dalam menyusun LKPD secara efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang selaku pengguna dari aplikasi SIMDA tersebut, maka LKPD yang dihasilkan akan berkualitas pula.

Sementara itu, Novia Citra Dewi dan Selia Mariska (2018) menyatakan bahwa SIMDA Keuangan telah terlaksana dan dipahami dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu: Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus rigkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran kas data, Lemahnya data *management system*, Prosedur untuk melihat data secara *incidental* masih terlalu lama, Tata ruang perkantoran masih kurang memadai, Seringnya *human error*, Seringnya aplikasi SIMDA Keuangan *expired*, dan Seringnya jaringan *offline*.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu pemerintah daerah yang menggunakan Aplikasi SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghasilkan laporan keuangan. BPKAD menggunakan aplikasi SIMDA sejak tahun 2008. Akan tetapi penggunaan SIMDA belum secara keseluruhan digunakan dalam penyusunan Laporan. Pada tahun 2008 hingga tahun 2011 aplikasi SIMDA hanya digunakan hingga tahapan penganggaran. Sedangkan tahapan pelaporan masih dilakukan secara manual, dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel, kemudian diteruskan untuk diperiksa oleh BPK. Mulai Tahun 2012 mulai full dalam penggunaan aplikasi ini, hingga ke tahap penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kendala lain yang dihadapi BPKAD yaitu belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, sehingga pemindahan data-data keuangan masih dilakukan dengan cara manual, sehingga untuk memindahkan data masih memakai system ekspor dan impor data. Hal ini dikarenakan koneksi internet yang masih sulit dijangkau. Masalah lain yang dihadapi adalah sumber daya manusia selaku operator yang masih belum maksimal dalam pengoperasian SIMDA Keuangan. Pemerintah Daerah berharap dengan adanya aplikasi SIMDA ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah demi mewujudkan *Good Governance* untuk mendukung capaian indikator kinerja dalam meningkatkan tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Meskipun belum maksimal dalam pengelolaan SIMDA terhadap asset dan kurangnya tenaga yang professional di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memperoleh sisi positif dalam penerapan aplikasi SIMDA ini, karena dilihat dari perkembangan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Capaian WTP yang kelima kali itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang

dilakukan Pemkab Ogan Ilir telah menerapkan SAP hampir di semua aspek. Kabupaten Ogan Ilir mendapat apresiasi dari pembuat aplikasi yaitu BPKP dan BPK karena termasuk 2 (dua) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang dalam penyusunan Laporan memakai aplikasi SIMDA secara keseluruhan. Dengan peraihan yang diperoleh Kabupaten Ogan Ilir tersebut artinya kinerja pegawai di Kabupaten tersebut mengalami peningkatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

Menurut Djibril (2017), efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Sementara itu menurut ahli lain, definisi efektifitas adalah perbandingan produktivitas dengan target, rencana ataupun suatu tolak ukur (Falih Suahedi 2010 : 108).

Indikator efektivitas penerapan program dirumuskan dengan cara mengkombinasi indikator yang dikemukakan Budiani (2007:53) dan Siagian (2006). Alasan dikombinasikannya kedua pendapat tersebut adalah karena indikator-indikator yang disebutkan di dalam dua pendapat ahli tersebut sesuai dengan kondisi objek yang sedang diteliti. Dengan demikian indikator efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung program
4. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
5. Pencapaian Tujuan program
6. Pemantuan dan evaluasi program

Kinerja Pegawai

Menurut Mangkunegara (2017:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Bernardin (dalam Ambar, 2003:223) secara definitif menjelaskan kinerja sebagai catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan Kusriyanto (dalam Anwar, 2009:9) berpendapat bahwa kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Adapun Sinambela (2006:137) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Robbins (2015), mengemukakan bahwa aspek untuk mengukur kinerja pegawai secara individu sebagai berikut:

1. Kualitas
Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas
Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas
Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian
Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.
6. Komitmen kerja
Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan disetiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Budiman et al., 2013), aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Mitami (2013), Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

METODELOGI PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Adapun jumlah pegawai pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir yang akan penulis jadikan sebagai populasi adalah sebanyak 41 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pegawai atau staf di BPKAD yang menggunakan aplikasi SIMDA dalam penyusunan laporan keuangan yaitu sebanyak 14 orang

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan model pembobotan skor Skala Likert. Untuk menguji kelayakan dan keandalan instrument kuesioner akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan program SPSS 26. Metode analisis yang digunakan adalah dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana juga dengan bantuan Program SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Struktur dan Pola Kerja Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Operasionalisasi Program SIMDA pada BPKAD Ogan Ilir dipegang dan ditangani oleh 3 sub unit yaitu: *Supervisor*, *User/operator*, dan *admin*. Berikut ini diuraikan tugas dari masing-masing sub unit tersebut.

1. *Supervisor*

Supervisor bertugas sebagai pengawas dari tugas yang dikerjakan oleh *admin*. Bertanggung jawab untuk memeriksa ke-valid-an database yg sudah diolah *User* dan telah dikoreksi oleh *admin*. Apabila masih terdapat kesalahan maka *supervisor* akan meminta pertanggungjawabab *admin* untuk memperbaikinya. *Supervisor* dalam operasionalisasi SIMDA di BPKAD Ogan Ilir hanya ada 1 orang saja.

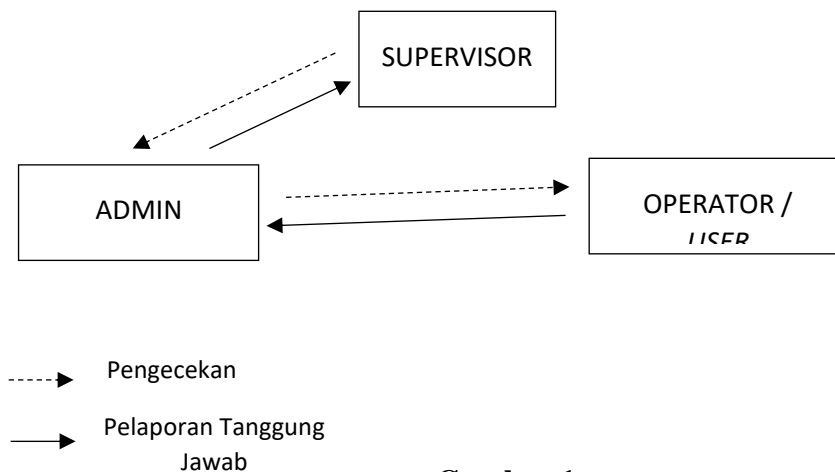
2. Admin.

Admin bertugas melakukan *back up* data, pengecekan data, bertanggung jawab atas data yang akan di laporkan kepada supervisor dan melakukan perbaikan atau inputan data dari *User* serta mengevaluasi hasil kerja dari *User*, karena kalau tidak dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat, baik secara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, maka laporan yang dihasilkan akan menjadi temuan dalam pemeriksaan. Pegawai yang bertugas sebagai admin berjumlah 6 orang.

3. *User/operator*

Tugas utama *User* adalah melakukan input data atas pekerjaan yang diberikan, serta melakukan ekspor/impor data terhadap berkas yang diajukan. *User* bertanggung jawab kepada admin. Melalui oberservasi awal terlihat kebanyakan *User* tidak memahami secara keseluruhan operasionalisasi dari aplikasi SIMDA tersebut, sehingga sering terjadi kesalahan yang pada akhirnya harus diperbaiki dari unit admin. Pegawai yang bertugas menjadi *User* berjumlah 8 orang.

Berikut ini Gambar 4.2. yang menggambarkan struktur dan pola kerja dari operasionalisasi Program SIMDA di BPKAD Ogan Ilir.



Gambar 1
Struktur dan Pola Kerja Operasionalisasi SIMDA

Gambar di atas menunjukkan struktur dan pola kerja operasionalisasi SIMDA dijalankan. Pada awalnya *entry* data dilakukan oleh *User* berdasarkan berkas-berkas yang diajukan. Kemudian *User* akan melaporkan hasil kerjanya kepada admin. Admin akan melakukan pengecekan hasil kerja *User*, apabila telah baik maka akan segera dilaporkan kepada *supervisor*. Namun apabila terdapat kesalahan, maka admin akan mengkoreksi hasil kerja dengan cara berkoordinasi dengan *User*. *Supervisor* bertugas melakukan pengecekan hasil kerja yang dilaporkan oleh admin, jika terdapat kesalahan, maka *supervisor* akan meminta admin mengecek dan mengkoreksi kembali hasil kerja tersebut.

HASIL PENELITIAN

Tabel berikut ini adalah hasil rekapitulasi jawaban responden pada instrumen kuesioner.

Tabel 1
Rekapitulasi Jawaban Responden

ITEM	Skala Likert									
	1		2		3		4		5	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
1	0	0	0	0	1	7	9	64	4	29
2	0	0	0	0	0	0	10	71	4	29
3	0	0	0	0	2	14	8	57	4	29
4	0	0	0	0	0	0	7	50	7	50
5	0	0	0	0	0	0	8	57	6	43
6	0	0	0	0	8	57	6	43	0	0
7	0	0	0	0	0	0	10	71	4	29
8	0	0	0	0	0	0	11	79	3	21
9	0	0	0	0	0	0	11	79	3	21
10	0	0	0	0	0	0	10	71	4	29
11	0	0	0	0	0	0	8	57	6	43
12	0	0	0	0	0	0	7	50	7	50
13	0	0	0	0	0	0	11	79	3	21
14	0	0	0	0	0	0	11	79	3	21
15	0	0	0	0	0	0	11	79	3	21
16	0	0	0	0	0	0	8	57	6	43
17	0	0	0	0	0	0	7	50	7	50
18	0	0	0	0	0	0	8	57	6	43
19	0	0	0	0	0	0	9	64	5	36
20	0	0	0	0	6	43	7	50	1	7
21	0	0	0	0	0	0	11	79	3	21
22	0	0	0	0	0	0	8	57	6	43
23	0	0	0	0	0	0	7	50	7	50

Sumber: Data olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat sebagian besar responden menjawab dengan jawaban “setuju” (skor 4) pada hampir seluruh item pertanyaan dengan rata-rata persentase frekuensi jawaban tersebut adalah 63 persen. Namun untuk item 6 jawaban didominasi oleh “Netral” (skor 3) dengan persentase jawaban sebesar 57 persen.

Sementara untuk jawaban “sangat setuju” (skor 5) rata-rata persentase frekuensi jawaban adalah di atas 31 persen untuk setiap item pertanyaan. Untuk jawaban “Kurang Setuju” (skor 3) rata-rata persentase frekuensi jawaban adalah sebesar 5 persen saja.

Untuk pilihan jawaban “tidak setuju” (skor 2) dan “sangat tidak setuju” (skor 1) rata-rata persentase frekuensi jawaban adalah 0 persen atau dengan kata lain tidak ada responden yang menjawab dengan kategori skor tersebut pada semua item pertanyaan kuesioner.

Untuk mengetahui penilaian deskriptif kuantitatif dari hasil rekapitulasi jawaban responden maka perlu dilakukan perhitungan Deskripsi Persentase untuk melihat kecenderungan jawaban responden. Perhitungan tersaji sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Deskripsi Persentase

ITEM	Skala Likert					Total Skor	Deskripsi Persentase	Penilaian
	1	2	3	4	5			
	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor			
1	0	0	3	36	20	59	84	Sangat Setuju
2	0	0	0	40	20	60	86	Sangat Setuju
3	0	0	6	32	20	58	83	Sangat Setuju
4	0	0	0	28	35	63	90	Sangat Setuju
5	0	0	0	32	30	62	89	Sangat Setuju
6	0	0	24	24	0	48	69	Setuju
7	0	0	0	40	20	60	86	Sangat Setuju
8	0	0	0	44	15	59	84	Sangat Setuju
9	0	0	0	44	15	59	84	Sangat Setuju
10	0	0	0	40	20	60	86	Sangat Setuju
11	0	0	0	32	30	62	89	Sangat Setuju
12	0	0	0	28	35	63	90	Sangat Setuju
13	0	0	0	44	15	59	84	Sangat Setuju
14	0	0	0	44	15	59	84	Sangat Setuju
15	0	0	0	44	15	59	84	Sangat Setuju
16	0	0	0	32	30	62	89	Sangat Setuju
17	0	0	0	28	35	63	90	Sangat Setuju
18	0	0	0	32	30	62	89	Sangat Setuju
19	0	0	0	36	25	61	87	Sangat Setuju
20	0	0	18	28	5	51	73	Setuju
21	0	0	0	44	15	59	84	Sangat Setuju
22	0	0	0	32	30	62	89	Sangat Setuju
23	0	0	0	28	35	63	90	Sangat Setuju

Sumber: Data olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, maka didapati bahwa hampir seluruh item pertanyaan dalam kuesioner mencapai kriteria “Sangat Tinggi”. Ini berarti sebagian besar responden menjawab dengan pilihan “Sangat Setuju” pada item-item pertanyaan kuesioner.

Hanya terdapat dua item pertanyaan yang mencapai kriteria “Tinggi” yaitu pada item 6 dan item 20. Dengan demikian untuk item 6 dan 20 sebagian besar responden menjawab pilihan jawaban “Setuju”. Item 6 berisi pertanyaan tentang Ketersediaan Jaringan Internet dan server yang baik yang mendukung kelancaran pengoperasian SIMDA. Sementara Item 20 berisi tentang pertanyaan tentang kemampuan pegawai menyelesaikan beban kerja tanpa dibantu siapapun.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk memprediksi pengaruh Efektivitas Penerapan SIMDAan (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) maka digunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS 26, didapati hasil sebagai berikut.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.929	5.320		1.115	.287
	Efektivitas SIMDA	.809	.104	.914	7.780	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Berdasarkan tabel output regresi “*Coefficients*” di atas, model regresi yang terbentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,929 + 0,809 X + 5,320$$

Model regresi tersebut menggambarkan bahwa perubahan variabel X (Efektivitas SIMDA) sebesar 1 persen akan menyebabkan perubahan pada variabel Y (Kinerja Pegawai) sebesar 0,809 persen.

Berdasarkan hasil regresi dari tabel *Coefficients* di atas, didapati hasil uji t. Dengan nilai alpha sebesar 0,05 (5%), terlihat nilai signifikansi (Sig.) pada uji t untuk variabel bebas nilainya lebih kecil dari nilai alpha ($0,00 < 0,005$). Dengan demikian kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , yang artinya Efektivitas Penerapan SIMDA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di BPKAD Ogan Ilir.

Berikut ini ini hasil yang diperoleh dari output regresi pada table *Model Summary* melalui program SPSS.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.914 ^a	.835	.821	1.810
a. Predictors: (Constant), Efektivitas SIMDA				
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai				

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,835. Hal ini artinya Efektivitas Penerapan SIMDA (X) berpengaruh sebesar 83,5 persen terhadap Kinerja Pegawai (Y), sedangkan sisanya sebanyak 16,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Penerapan SIMDA berpengaruh besar terhadap pembentukan variabel Kinerja Pegawai di BPKAD Ogan Ilir.

Pembahasan Pengaruh Efektivitas Penerapan SIMDA Terhadap Kinerja Pegawai Di BPKAD Ogan Ilir

Berdasarkan hasil estimasi regresi serta hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t melalui program SPSS, maka didapati kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan SIMDA memang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat Kinerja Pegawai di BPKAD Ogan Ilir. Hasil ini juga diperkuat dengan hasil perhitungan deskripsi persentase dari jawaban responden pada kuesioner, sehingga dapat disimpulkan indikator-indikator penyusun variabel Efektivitas Penerapan SIMDA memiliki hubungan serta berpengaruh kuat terhadap indikator-indikator penyusun variabel Kinerja Pegawai.

Jika dilihat melalui sudut pandang indikator yang menyusun variabel Efektivitas Penerapan SIMDA penelitian ini, yaitu khususnya pada indikator Ketersediaan Sarana dan Prasaran yang mendukung SIMDA, didapati bahwa terdapat masalah utama yaitu kualitas server dan jaringan internet yang tidak stabil serta kurang baik. Hal ini tentu membuat terhambatnya pengoperasian SIMDA yang dalam alur operasionalisasinya mutlak memerlukan kualitas server dan jaringan internet yang stabil dan baik. Permasalahan ini memang sulit dicarikan solusinya mengingat posisi kantor BPKAD berada di wilayah yang memiliki cakupan sinyal jaringan internet yang belum prima dan stabil. Penambahan peralatan-peralatan tertentu untuk memperkuat tangkapan sinyal jaringan internet dapat saja dilakukan namun memerlukan biaya yang cukup mahal.

Dari sisi indikator kemandirian khususnya pada item nomor 20 pada kuesioner yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan tentang kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan terdapat satu masalah yaitu kemandirian pada unit *user* akibat kurangnya pengetahuan

tentang operasionalisasi SIMDA sehingga menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam pengoperasian SIMDA. Melalui observasi lapangan diketahui penilaian kurangnya kemandirian ini dikemukakan oleh unit admin berdasarkan pengalaman yang sering terjadi. Unit admin yang selalu merasa menjadi pihak yang direpotkan akibat kesalahan yang dibuat oleh *user*, menganggap *user* belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang SIMDA. Kesalahan-kesalahan yang dibuat *user* mengakibatkan pekerjaan dikoreksi ulang dan diperbaiki oleh pihak admin sehingga proses penyelesaian pekerjaan sedikit mengalami hambatan.

Untuk dapat mengatasi permasalahan *user* ini, BPKAD Ogan Ilir dapat menerapkan solusi yaitu mengadakan pelatihan Operasionalisasi SIMDA yang komprehensif terhadap *user*. Diharapkan dengan pelatihan tersebut pengetahuan *user* tentang SIMDA akan bertambah sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan yang akan dibuat.

Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah cukup efektif dilaksanakan. Efektivitas penerapan SIMDA pun telah memacu peningkatan kinerja pegawai khususnya dalam menghadirkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ogan Ilir yang akuntabel, efektif dan efisien. Memang terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat kelancaran operasionalisasi SIMDA, namun dibandingkan dengan efek lainnya yang mempermudah pekerjaan maka penerapan SIMDA pada BPKAD Ogan Ilir dapat dinilai sudah cukup efektif dan memberikan dampak yang positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis pada bab pembahasan, maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi regresi, nilai koefisien determinasi, serta hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, maka didapati kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan SIMDA memang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat Kinerja Pegawai di BPKAD Ogan Ilir.
2. Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ili telah cukup efektif dilaksanakan. Efektivitas penerapan SIMDA pun telah memacu peningkatan kinerja pegawai khususnya dalam menghadirkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ogan Ilir yang akuntabel, efektif dan efisien. Memang terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat kelancaran operasionalisasi SIMDA, namun dibandingkan dengan efek lainnya yang mempermudah pekerjaan maka penerapan SIMDA pada BPKAD Ogan Ilir dapat dinilai sudah cukup efektif dan memberikan dampak yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, C., Masnidi, R., & Rachman, R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Akuntansi*, (September 2015)
- Azzindani Rahmatia, et.all. 2019. Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah Vol. 27 No. 1. April (2019): 418-445, E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana, DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p16>

- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol.2, No.1. Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Bali
- Budiman, Fuad, and Fefri Indra Arza. 2013. “Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.” *Wahana Riset Akuntansi* 1(1): 87–110. <http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/2315>
- Beni Peki. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1 Jakarta Pusat: Taushia
- Dewi, Novia Citra, dan Selia Mariska. 2018. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* - Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018.
- Diana, P., Eforis, C., & Osesoga, M.S. (2018). Pengaruh Implementasi Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 110–123.
- Djadja Sukirman. Et al. 2009. Pemahaman Laporan Keuangan dengan SIMDA Keuangan. Jakarta. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keungan Daerah.
- Diana, P., Eforis, C., & Osesoga, M. S. (2018). Pengaruh Implementasi Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 110–123
- Devi, V. F. P. 2013. Pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah (penelitian pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu Sp. 2011. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke 10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hertanto, Yogi, Tjahjanulin Domat, et, all. 2017. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Publisia*, Vol 2, No 1 Universitas Merdeka Malang.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak. Diunduh dari (http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file-file/artikel_abstrak/Isi_Artikel_649299136533.pdf).
- Kristiani, Wahyu. 2012. Analisis Pengaruh Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia. *Ekonomi: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2017, *Evaluasi Kinerja SDM*, Cetakan Kedelapan, PT. Refika Aditama.

- Malayu S.P Hasibuan, 2017, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasrul, et.all. 2018. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Berbasis Akrual Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (The Effect of Using Accrual Based Financial Management Information System And Work Satisfaction On Employee Performance), Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Organisasi (JUMBO), Vol. 2, No. 2, Agustus 2018, hal.01-13, e-ISSN: 2502-4175.
- PP Nomor 56 tahun 2005, tentang Informasi Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suradinata, Ermaya. 1997. Pimpinan dan Kepemimpinan Pemerintah Pendekatan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Werther, William B & Keith Davis., (1996). Human Resources and Personnel Management. New York: Me Graw - Hill, Inc.
- Yogi Hertanto, Tjahjanulin Domai, Fadillah Amin, 2017. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 2, No 1 (2017)